RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN LABUHANABTU
TA. 2024

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.1.1 Pengertian Renja 2
1.1.2 Proses Penyusunan Renja 2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 8
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU 2023 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU 18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21
3.2.1. Tujuan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu 21
3.2.2. Sasaran Renaja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu 21
3.3. Program dan Kegiatan 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU 26
4.1. Kerangka Pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 26
4.2. Rencana Belanja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 26

BAB V PENUTUP 40

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya dapat diselesaikan penyusunan Rencana Kerja RKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dimana Penyusunan Renja RKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2016, serta hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya

Dengan tersusunnya penyusunan Rencana Kerja RKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kearah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu.

Kami berharap semoga Rencana Kerja RKPD ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu 2025 serta dapat mencapai hasil yang baik di Kabupaten Labuhanbatu yang kedepannya dapat diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunannya.

Rantauprapat, 21 Juli 2024
Kepala Dinas,

Bonaran Tambunan, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680109 198903 1 002

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme merupakan perwujudan dari *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (SKPD) dituntut melakukan kinerja secara maksimal guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah, untuk Dinas PertanahanKabupaten Labuhanbatu dengan Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Sehubungan dengan hal tersebut, Megacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menyusun Dokumen Renja 2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pada tahun tersebut. Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan di Kabupaten Labuhanbatu dapat berperan secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

Dipindai dengan CamScanner

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Labuhanbatu kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanahan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Labuhanbatu menjadi mutlak, yaitu sebagai dasar yang dapat dipedomani pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Labuhanbatu dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Labuhanbatu pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal, dengan fokus melakukanpengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1.1.2.1 Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Kerja SKPD

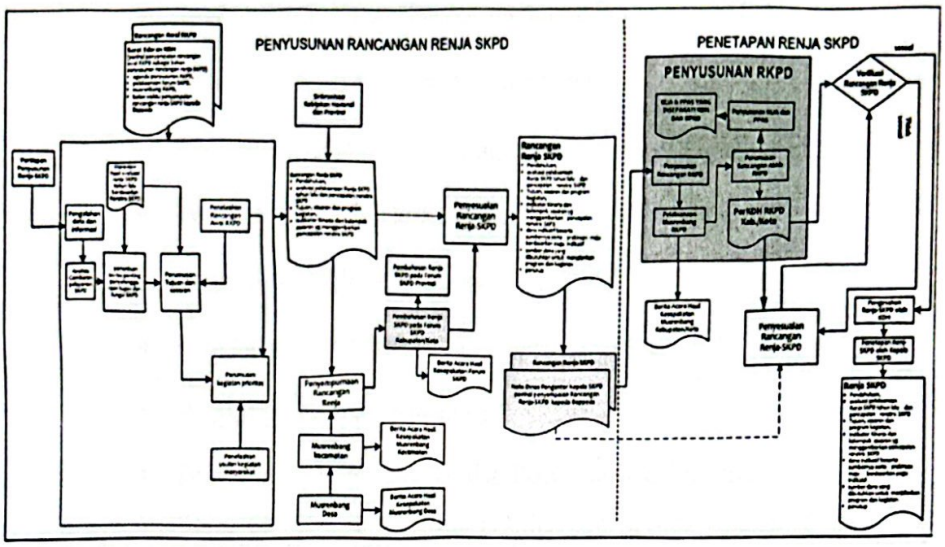
Dipindai dengan CamScanner

yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentangRKPD.

1.1.2.2 Program dan Kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

1.1.2.3 Program dan Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

1.1.2.4 Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Proses Penyusunan Renja

Adapun tahapan persiapan proses penyusunan renja yaitu:

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja;
- Orientasi Mengenai Renja;
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja; dan
- Pengumpulan Data dan Informasi.

b. Pengolahan Data Dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh

Dipindai dengan CamScanner

kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun laluberdasarkan Renstra SKPD;
- Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja SKPD;
- Pembahasan forum SKPD; dan Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

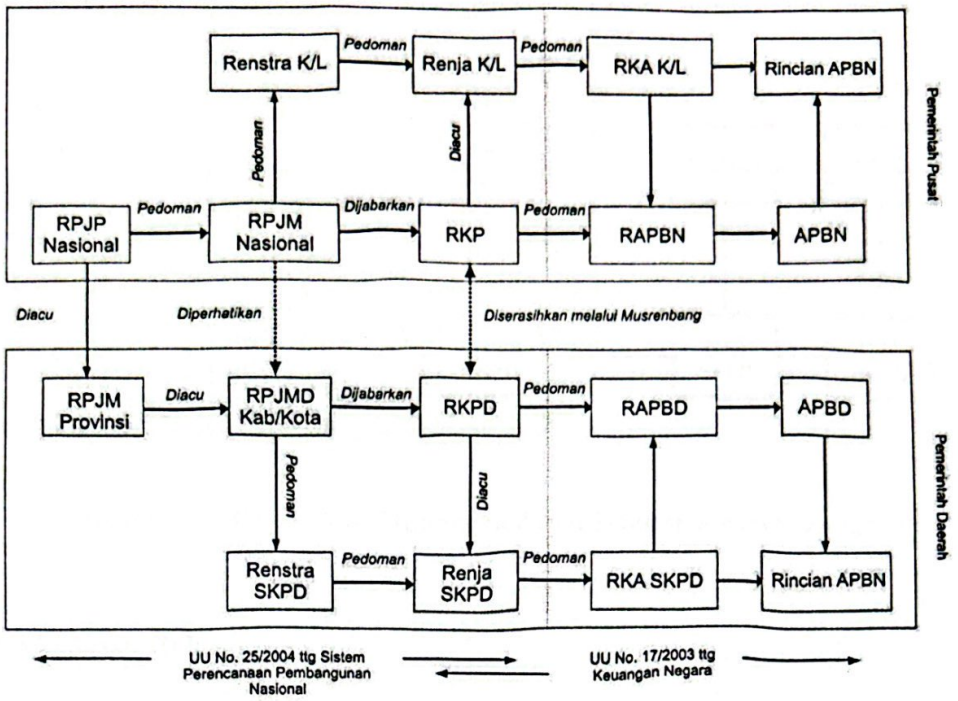
d. Penyajian dan penyampaian Rancangan Renja;

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD;

f. Penetapan Renja.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dijabarkan padagambar 1.2, dibawah ini :

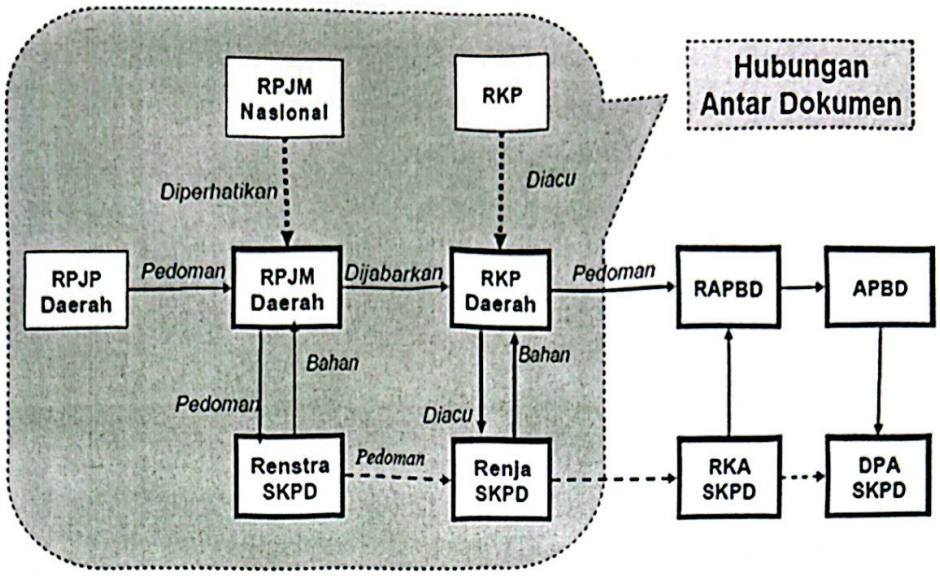


Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunandi lingkup Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Labuhanbatu merupakan penjabaran Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu 5 (lima) Tahun. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunanyang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya, yang dijabarkan melalui gambar 1.3 dibawah ini:

Dipindai dengan CamScanner



Gambar 1.3 Bagan Alur Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Dipindai dengan CamScanner

Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam

Dipindai dengan CamScanner

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klsifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran, Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan MasaJabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kabupaten LabuhanbatuTahun Anggaran 2025 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021-2026 yang telah disusun;

b. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;

d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk

Dipindai dengan CamScanner

memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu; Sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan program/ kegiatan pada tahun 2025 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD, Landasan Hukum serta sistematika penulisan dengan sub bab sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah; dan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan dengan sub bab sebagai berikut :

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; dan

Dipindai dengan CamScanner

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *outputs* dengan *inputs* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai *inputs* dengan *outputs*. Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis Pada Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Mengingat program dan kegiatan Tahun 2024 masih pada tahap pelaksanaan, maka evaluasi rencana kerja SKPD diukur melalui capaian kinerja pada Tahun 2023. Berikut sekilas pemaparan capaian evaluasi kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2023 :

1. Secara Keseluruhan dapat digambarkan pada Tahun 2023 tidak tercapainya dikarenakan Anggaran kurang maksimal
2. Dikarenakan adanya Pemotongan Anggaran untuk tahapan Pemilu di Tahun 2024 .
3. Kegiatan tidak maksimal dilakukan di karenakan adanya rekofusing tahun 2023.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu s/d Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Kelengkapan Administrasi Perkantoran	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	95,36 %	1 Thn	-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat per-Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan dasar per-Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	100%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Kantor	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	99,83%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja	1 Thn	NA	1 Thn	1 Thn	99,87%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan ATK per-Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	99,25%	1 Thn	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan per-Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	99,10%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik per-Tahun	1 Thn	NA	1 Thn	1 Thn	87,29%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan perlengkapan per-Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	98,63%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga per-Tahun	1 Thn	NA	1 Thn	1 Thn	99,55%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan per-Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	96,11%	1 Thn	-	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum per-Tahun	1 Thn	NA	1 Thn	1 Thn	99,88%	1 Thn	-	-
		Rapat-Rapat Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi per-Tahun	60 kali	50 kali	56 kali	56 kali	99,01%	60 kali	-	-
		Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	Dokumentasi Kantor per-Tahun	1 Thn	NA	1 Thn	1 Thn	100%	1 Thn	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi perkantoran per-Tahun	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	94,74%	1 Thn	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Thn	1 Thn	1 Thn	1 Thn	79,06%	1 Thn	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	0	d. R4/ 7 unit	0	1 unit kend. R4/ 7 unit Kend. R2		1 unit kend. R4/ 7 unit Kend. R2	-	-
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah rehab per-Tahun	0	NA	0	1 Paket	0	1 Paket	-	-
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan per- Tahun	8 Unit	NA	8 Unit	8 Unit	79,84%	8 Unit	-	-
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor per-Tahun	1 Thn	NA	1 Thn	1 Thn	68,71%	1 Thn	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Penilaian Inspektorat terhadap SAKIP Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu	100%	99,87%	51,90%	51,90%	98,10%	0,53	-	-
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineerja SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	98,10%	1 Laporan	98,10%	98,10%	1 Laporan	-	-
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	98,34%	1 Laporan	-	-
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase Ketersediaan Data	40%	25%	20%	90,99%	99,85%	99,85%	-	-
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	99,85%	1 laporan	-	-
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimun dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	98,78%	0 laporan	-	-

Dipindai dengan CamScanner

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Ketersediaan Data	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,77%	1 Dokumen	-	-
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99,97%	1 Laporan	-	-

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang diamanatkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yangingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerjayang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Merupakan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia yang direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga jangka pendek (Tahunan). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2025-2045 menetapkan Visi Indonesia yang harus dicapai pada Tahun 2045 adalah **"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur"** yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2023 berada pada tahap menengah yang ke-3 (tiga) yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) 2023-2026 dengan visi **"Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Makmur dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong Royong".** Untuk melaksanakan hal tersebut, Pemerintah dala setiap Tahunnya membuat suatu Rencana Kerja Pemerintah yang dilaksanakan guna mencapai visi tersebut, adapun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Pada Tahun 2023 yaitu:

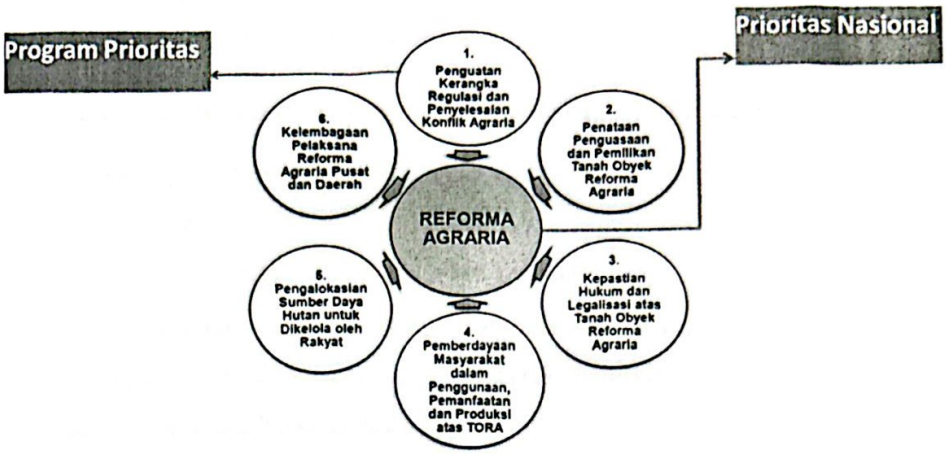


Gambar 3.1 Tema Rancangan RKP 2023

Pada gambar diatas telah dijabarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Dengan Tema **"Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas"**, berdasarkan tema tersebut, maka diharapkan visi RPJMN 2023- 2026 dapat dicapai. Pada bidang pertanahan/ agraria, Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun terakhir untuk

Dipindai dengan CamScanner

pelaksanaan Program Prioritas Reforma Agraria. Adapun kegiatan prioritas dari performa agraria yaitu :



Gambar 3.2 Penjabaran Program Reforma Agraria

Adapun Penjabaran Program Prioritas Nasional Reforma Agraria yaitu:

1. **Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria**
   a. Reviuw peraturan perundangan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria penyelesaian konflik agraria;
   b. Mengidentifikasi dan memverifikasi kasus-kasus konflik agraria struktural di berbagai sector strategis;
   c. Menganalisa dan menyusun pendapat hukum serta merekomendasikan penyelesaian kasus konflik agraria;
   d. Melakukan reviu terhadap hak/ izin usaha serta merubah tata batas kawasan hutan untuk rakyat;
   e. Koordinasi dan supervise dengan K/L dalam menjalankan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus konflik agraria;
   f. Mediasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) lainnya untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di semua sektor strategis.

Dipindai dengan CamScanner

2. **Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria**

   a. Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
   b. Identifikasi Redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, tanah terlantar dan TORA lainnya;
   c. Identifikasi dan legalisasi aset tanah milik masyarakat miskin.

3. **Kepastian Hukum Dan Legalisasi Atas Tanah Obyek ReformaAgraria**

   a. Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas reforma agraria di Kab/ Kota;
   b. Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan;
   c. Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sector) terutama bagi rakyat miskin;
   d. Publikasi tata batas kawasan hutan;
   e. Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasilredistribusi;
   f. Legalisasi untuk tanah transmigrasi;
   g. Sosialisasi peraturan terkait adat/ ulayat dan legalisasi pengakuanwilayah adat.

4. **Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatandan Produksi atas TORA.**

   a. Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tataguna pada TORA;
   b. Penyediaan dan pengembangan teknologi sarana-prasarana dalam produksi dan pengelolaan hasil pertanian, peternakan dan perkebunan;
   c. Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha.

5. **Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah**

   a. Penyediaan pedoman teknis dalam kerangka Reforma Agraria;
   b. Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Pemerintah Pusat;
   c. Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di

Dipindai dengan CamScanner

Daerah

d. Penyusunan Peraturan Presiden tentang lembaga penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
e. Kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk TORA;
f. Menyusun prioritas lokasi bagi penyediaan tanah untuk kepentingan umum;
g. Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi TORA;
h. Interkoneksi dengan dunia usaha dan pemasaran hasil produksi;
i. Sekolah lapang petani subyek penerima manfaat reforma agraria untuk perbaikan tata guna tanah dan produksi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu agar dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional; dan
3. Meningkatnya tujuan Reformasi Agraria yang berkesinambungan,yang terdiri dari:
   a. Menurunnya angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja;
   b. Meningkatnya akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, khususnya bidang pertanahan;
   c. Terwujudnya penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria;
   d. Menurunnya angka perkara, sengketa dan konflik agraria;
   e. Terwujudnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran2025 diantaranya adalah :

a. Terlaksananya pelayanan berkualitas dibidang pertanahan dengan meningkatkan

Dipindai dengan CamScanner

kemampuan sumber daya aparatur;

b. Tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Kabupaten Labuhanbatu;
c. Terlaksananya kebijakan pertanahan dan penyuluhan hukumpertanahan;
d. Terlaksananya penanganan permasalahan agraria;
e. Tersedianya data pertanahan;
f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan sasaran dan kesesuaian pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu telah merencanakan 3 program Prioritas yang diuraikan pada 9 kegiatan dan 22 Sub kegiatan antara lain:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dipindai dengan CamScanner

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

7. **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

a. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH *KELEBIHAN MAKSIMUM* DAN TANAH ABSENTEE

8. **Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

a. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

9. **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

Adapun indikator kinerja capaian program, sasaran program, pagu indikatif dan sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu:

1. **Indikator Kinerja Program yang ingin dicapai antara lain:**
   a. Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran;
   b. Persentase jumlah sarana yang dibutuhkan;
   c. Jumlah dokumen pelaporan; Persentase jumlah penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah;
   d. Persentase jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yangdiselesaikan;
   e. Jumlah Sistem Informasi Pertanahan.

2. **Sasaran kinerja program yang ingin dicapai meliputi:**
   a. Terwujudnya administrasi perkantoran yang professional, efektifdan efisien;
   b. Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang handaldan akuntabel;
   c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur;
   d. Meningatnya disiplin aparatur;
   e. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
   f. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
   g. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah dan pemberdayaan masyarakat penerima redistribusi tanah dan legalisasi aset;
   h. Menurunnya tingkat permasalahan agraria (perkara, sengketa dan konflik pertanahan);
   i. Tersedianya Sistem Informasi Pertanahan yang handal;
   j. Terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaanreforma agraria.

3. **Lokasi kegiatan**

Lokasi pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

4. **Kebutuhan dana indikatif**

Jumlah kebutuhan dana indikatif adalah sebesar Rp. 2.803.362.284,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*)

5. **Sumber Dana**

Sumber dana dari APBD Tahun Anggaran 2025 (Pendapatan Asli Kabupaten Labuhanbatu, Dana Alokasi Umum Kabupaten Labuhanbatu). Rincian rencana program dan

Dipindai dengan CamScanner

kegiatan prioritas Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 dalam hal keterkaitannya dengan program prioritas daerah beserta pagu indikatif dijabarkan pada tabel

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU

4.1 Kerangka Pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025

Kerangka kerja dan pendanaan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam tabel RKA Tahun 2025 sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANAHAN KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANAHAN						2.803.362.284,00							3.132.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.803.362.284,00							3.132.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						2.803.362.284,00							3.132.000.000,00	
1.	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan*	90 %			90 %	2.641.815.113,00						90 %	2.907.000.000,00	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat Pemenuhan Sistematika dan Waktu Penyusunan Dokumen*	95%			95 %	56.614.934,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu	95%	9.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM:DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		6.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	51.614.934,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		3.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*	95 %			95 %	2.084.509.585,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu	95 %	2.153.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	1.952.806.585,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		2.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	127.980.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.723.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		3.500.000,00	DINAS PERTANAHAN

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*1. Rasio ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, 2. Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*	100^%			100 %	57.847.804,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu	100^%	95.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28.490.800,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	29.357.004,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		65.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran*	100 %			100 %	224.268.540,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu	100 %	425.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.517.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	45.355.740,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	27.434.200,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		15.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22.565.600,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	109.396.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran*	100 %			100 %	163.411.200,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu	100 %	168.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		8.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	56.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	99.811.200,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan Layak Pakai*	90`%			85 %	55.163.050,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu	90`%	56.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	39.773.050,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	15.390.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		16.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	*Persentase Sengketa Tanah yang Selesai di Fasilitasi*	100 %			100 %	69.286.000,00						100 %	105.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Labuhanbatu*	100%			100 %	69.286.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu	100%	105.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	30.408.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		60.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	38.878.000,00	Kab. Labuhanbalu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbalu		45.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
3.	2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Cakupan Fasilitasi Usulan Objek TORA***	**100 %**			**100 %**	**30.000.000,00**						**100 %**	**50.000.000,00**	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya data yang akan diusulkan sebagai Objek TORA***	-			100 %	30.000.000.00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbalu	-	50.000.000.00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentasi Fasilitasi Batas Desa/Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu***	**77 %**			**77 %**	**62.261.171,00**						**77 %**	**70.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kecamatan*	88%			77 %	62.261.171,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu	88%	70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	62.261.171,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Utara, Padang Matinggi	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	JUMLAH							2.863.362.284,00							3.132.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan dokumen rancangan perencanaan SKPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Strategis Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif,efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dapat kami sampaikan sebagai Kebutuhan Anggaran yang sudah ada belum sesuai dengan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, maupun dengan RPJMD

Demikian Rancangan ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan Pembuatan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu serta peran aktif *stakeholder* yang terkait.

Dipindai dengan CamScanner